UPAYA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Eko Raharjo

ABSTRAK

Persoalan kejahatan bukan saja mendapat sorotan dari masyarakat di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga menjadi perhatian yang serius dari kalangan masyarakat internasional. Salah satu kejahatan yang kini sering dijadikan bahan diskusi oleh para akademisi hukum, ekonomi dan perbankan, aparaturnya pemerintahan dan penegak hukum adalah mengenai kejahatan pencucian uang (money laundering), terlebih lagi dengan adanya anggapan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan "sorga" bagi praktek – praktek tindak pidana atau kejahatan pencucian uang. Masalah hukum tersebut kian menjadi sorotan dengan dimasukkannya Negara Indonesia dalam daftar hitam atau black list.

Kata Kunci: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tindak Pidana Pencucian Uang

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan pada masa-masa sekarang juga telah mengalami kemajuan, bahkan mengikuti kecanggihan teknologi informasi. Ada banyak aksi kejahatan yang terjadi dalam keseharian kehidupan bermasyarakat, misalnya kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan narkoba atau obat – obat terlarang, praktek pencucian uang atau *money laundering*, dll.

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang mempunyai dimensi ekonomi dengan skala internasional sehingga diperlukan suatu standar pengaturan dan persepsi secara universal, di samping mengadakan tindakan-tindakan penanggulangan yang dilakukan secara bersama-sama atau bersifat kerjasama.

Sutan Remy Sjahdeini pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat

dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹

Berlandaskan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip dasar tindak pidana pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari sejumlah uang yang berasal dari aktifitas ilegal dengan maksud untuk menjadikan uang tersebut sebagai uang yang halal, karena seolah diperoleh dari sumber yang sah. Dampak dari kejahatan ini menurut John McDowel dan Gary Novis dalam Sutan Remy Sjahdeini² pada intinya mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan moneter, termasuk didalamnya terhadap kebijakan mikro dan makro ekonomi. Sedangkan pada sisi lainnya, *money laundering* ini akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindakan pidana yang menjadi pemicu dari pencucian uang seperti korupsi, pengedaran narkoba, penyelundupan, *illegal logging*, dsb. Hal ini dikarenakan tindak pidana *money laundering* merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan awal atau asalnya.

Sedemikian berbahayanya dampak yang akan ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang tersebut mengharuskan setiap Negara, termasuk Negara Indonesia untuk mengadakan instrument-instrumen hukum atau peraturan perundang-

¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, hlm. 5.

² *Ibid*, hlm. 18

undangan guna mencegah sekaligus menanggulangi kejahatan pencucian uang. Untuk konteks Negara Republik Indonesia, masalah pencucian uang di tegaskan sebagai tindak pidana pada tanggal 17 April 2002, yaitu dengan disahkannya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang undang tersebut kemudian mengalami perubahan pada tanggal 13 Oktober 2003, yaitu semenjak dilakukannya pengesahan terhadap Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003, maka untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga PPATK merupakan lembaga yang bersifat independent dalam rangka mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang yang berkedudukan di Ibukota Negara, dan dalam hal diperlukan dapat membuka perwakilan PPATK di daerah (Pasal 1 angka 10 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003).

Pembentukan PPATK menurut undang-undang tentang pencucian uang tersebut pada dasarnya memfokuskan tugas dan wewenang PPATK dalam rangka mencegah sekaligus memberantas atau menanggulangi tindak pidana keuangan, Khususnya terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan di penyedia jasa keuangan, misalnya perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, *custodian*, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos (vide Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003).

PPATK mangemban beban tugas yang cukup berat untuk memberantas praktek praktek kejahatan pencucian uang, terlebih lagi PPATK masih tergolong sebagai lembaga yang baru. Dengan kompleksitas permasalahan kejahatan pencucian uang yang cukup pelik tersebut tidak dapat dinafikan adanya kendala-kendala atau hambatan yang sedang atau akan dihadapi oleh PPATK dalam melakukan pencegahan dan

penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Hal ini perlu dicermati dan dipahami secara bersama-sama sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dapat berjalan secara baik dan benar, serta sesuai dengan maksud dari tujuan dari pembentukan Lembaga PPATK.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh PPATK untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan apakah penghambat bagi PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dilengkapi dengan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya PPATK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank lain atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi Negara. Untuk itu PPATK berdasarkan Pasal 26 huruf e Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 mempunyai tugas membuat pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan.

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan PPATK dalam upaya mengimplementasikan Undang Undang Money Laundering secara kontekstual dapat dicermati dari banyak regulasi yang merupakan ketentuan pelaksana agar operasionalisasi undang-undang tersebut dapat berjalan lancar. Ketentuan ini diterbitkan dalam bentuk legal formalnya adalah keputusan kepala PPATK, yang meliputi: (i) Pedoman Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (ii) Pedoman Identifikasi dan Pelaporan

Transaksi Keuangan mencurigakan, baik itu untuk Penyedia Jasa Keuangan, Pedagang Valuta Asing maupun usaha jasa Pengiriman uang, (iii) Pedoman Pengecualian dalam transaksi secara tunai. Hal ini selaras dengan keterangan dari hasil wawancara dengan analisis hukum PPATK, Agus Triyono maupun dengan analisis hukum Senior, Garda T. Paripurna yang menyatakan bahwa regulasi yang merupakan pedoman-pedoman untuk memerangi *money laundering* adalah upaya pembangunan rezim anti *money laundering*.

Menurut Agus Triyono rezim anti pencucian uang merupakan paradigma baru didalam upaya membantu memberantas korupsi. Hal ini merupakan pendekatan baru yang lebih memfokuskan pada penelusuran aliran uang haram (*follow the money trail*) yang dapat digunakan untuk membantu memerangi korupsi, peredaran narkoba, dan berbagai perolehan dana secara tidak sah lainnya. Rezim ini meyakini bahwa hasil kejahatan adalah *life blood of the crime*, yaitu merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah karena pencucian uang adalah kejahatan lanjutan yang ditujukan menutupi kejahatan awalnya. Upaya inilah yang kiranya merupakan pemotongan rantai kejahatan karena selain relative lebih mudah dan sistematis juga akan menghilangkan motivasi pelakunya karena tujuan untuk menikmati hasil kejahatan menjadi terhalangi. Dalam hal ini menurut Agus Triyono Lembaga Penyedia Jasa keuangan merupakan ujung tombak karena indikasi adanya kejahatan pencucian uang berawal dari pelaporan lembaga Penyedia Jasa Keuangan. Artinya, melalui laporan Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi mencurigakan maka penelusuran atau penyelidikan kejahatan dapat dilakukan.

Tindak pidana pencucian uang paling dominant dilakukan dengan menggunakan sistem keuangan, yaitu melalui lembaga keuangan perbankan karena lembaga ini dinilai paling banyak menawarkan instrument keuangan. Analisis Hukum Senior PPATK mengatakan pemanfaatan Penyedia Jasa Keuangan seperti bank dalam kejahatan pencucian uang dapat saja berupa:

- a. menyimpan uang dengan nama palsu;
- b. menyimpan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro dalam beberapa rekening sehingga menghindari kecurigaan;

- c. menukar uang hasil kejahatan ke dalam pecahan yang lebih besar atau lebih kecil;
- d. menggunakan fasilitas transfer dengan teknologi Swift;
- e. melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen yang dilakukan bekerjasama dengan oknum pejabat terkait.
- f. pendirian atau pemanfaatan bank gelap;
- g. bank yang bersangkutan dapat diminta untuk memberikan kredit kepada nasabah pemilik simpanan dengan jaminan uang yang disimpan pada bank tersebut.

Agus Triyono dalam hal ini mengatakan, jika ditinjau dari latar belakang pembentukan PPATK sebagaimana amanat undang-undang pencucian uang adalah merupakan strategi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana keuangan yang man secara mutlak memerlukan akses informasi keuangan untuk dapat dilakukannya investigasi keuangan yang tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan melacak pergerakan dana dengan maksud mengungkapkan jejak yang ditinggalkan pelaku kejahatan. Dalam kaitan ini maka PPATK memainkan peranan penting sebagai lembaga yang berwenang terhadap pengumpulan dan analisa informasi keuangan. Untuk informasi ini PPATK menyediakan SDM yang memiliki keahlian khusus misalnya di bidang akunting, ekonomi dan keuangan, bisnis, hukum dan penguasaan teknologi system teknologi informasi karena pendirian PPATK yang bertugas menerima dan menganalisis informasi keuangan yang menjadi kewajiban Penyedia Jasa Keuangan harus mampu mengetahui latar belakang dan fenomena pencucian uang termasuk di dalamnya kepesatan modus operandi dari tindak pidana tersebut.

Dari hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa pada pokoknya upaya PPATK dalam memberantas kejahatan pencucian uang berkaitan erat dengan penyelenggaraan identifikasi atas penerimaan *suspicious or unusual transaction report, and currency transaction report*, melakukan analisa terhadap laporan tersebut dan meneruskan hasil analisisnya kepada pihak penegak hukum. Untuk mendukung terselenggaranya *competent authorities* tersebut maka PPATK membuat aturan yang merupakan pedoman dalam hal:

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
- b. memiliki akses terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan jasa maupun informasi keuangan, penyelenggaraan administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
- c. menyampaikan informasi keuangan dan intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan pencucian uang, termasuk di dalamnya melakukan pertukaran informasi keuangan dan intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri dalam rangka kerjasama memberantas pencucian uang.

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum PPATK melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik maupun penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi ini dapat berasal dari *database* PPATK atau *sharing information* dengan lembaga sejenis di luar negeri. Dalam prakteknya kewenangan PPATK dapat menerima informasi dari pihak ketiga baik perorangan maupun entitas mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang oleh sesuatu pihak.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat dikemukakan bahwa PPATK sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk memerangi tindak pidana pencucian uang pada dasarnya melakukan upaya yang menacu kepada pedoman atau regulasi yang telah disusun dalam bentuk formalnya berdasarkan hasil analisa informasi dari berbagai lembaga sejenis luar negeri yang telah terbentuk sebelum berdirinya PPATK terkait dengan modus operandi pencucian uang termasuk di dalamnya mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri seperti pelatihan, sosialisasi dan pertukaran informasi. Selain dari itu PPATK membuat kebijakan dan langkah-langkah guna pemberantasan pencucian uang, seperti mengeluarkan regulasi yang menjadi pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan, termasuk mengaktifkan *compliance audit* terhadap Penyedia Jasa Keuangan, memaksimalkan tenaga-tenaga ahli, dan peningkatan kemampuan aparat instansi terkait dalam rangka pembangunan rezim anti pencucian uang, serta memaksimalkan perlengkapan teknologi informasi

yang ada. Langkah--langkah yang telah dilakukan itu adalah modal awal dalam membangun rezim anti pencucian uang sehingga dapat dipandang membantu menciptakan stabilitas sistem keuangan dan sekaligus menurunkan angka kriminalitas.

Faktor-faktor Penghambat PPATK dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagaimana diketahui, FATF dalam sidang yang berlangsung tanggal 5 – 11 Februari 2005 di Paris telah memutuskan untuk mengeluarkan Negara Indonesia dari daftar NCCTs di mana Indonesia berada dalam daftar NCCTs tersebut tercatat sejak Juni 2001. Dikeluarkannya Indonesia dari daftar tersebut menurut 2 (dua) Analisis Hukum PPATK berarti bahwa dunia internasional telah memandang Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dalam melakukan upaya pembangunan rezim anti pencucian uang. Meskipun demikian menurut kedua Analisis tersebut FATF dalam keputusannya meminta Indonesia untuk melanjutkan *sustainable development* dan menyampaikan laporan pelaksanaan *implementation plan* secara periodik yang mana FATF akan melakukan monitoring selama 1 (satu) tahun serta meminta Indonesia memfokuskan beberapa hal yaitu:

- a. mendorong agar *small banks* menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan;
- b. meningkatkan *capacity building* terutama kepada penegak hukum yang menangani perkara pencucian uang;
- c. penanganan perkara yang tepat waktu;
- d. pemeriksaan (audit) terhadap Penyedia Jasa Keuangan secara tegas;
- e. mengundangkan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) serta melaksanakan kerjasama internasional dibidang penegakan hukumnya;
- f. memenuhi komitmen untuk mendukung operasionalisasi PPATK yang meliputi penyediaan Anggaran, gedung perkantoran, sistem penggajian tersendiri dan kewenangan pengangkatan pegawai tetap PPATK.

Selanjutnya Analisis Hukum PPATK tersebut menjelaskan dari keenam *pointers* di atas ada beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan guna pembangunan rezim anti pencucian uang. Adapun kendala-kendala atau yang merupakan

hambatan dalam penanggulangan pencucian uang oleh PPATK titik tekannya seperti termuat pada point 2, 4 dan point 6. Menurut keterangan Agus Triyono hal itu berkaitan dengan kesiapan Penyedia Jasa Keuangan seperti bank-bank dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, termasuk aparat penegak hukum maupun sumber daya manusia dari internal PPATK sendiri. Demikian pula dengan disadarinya keterbatasan teknologi informasi yang mutakhir seperti pemenuhan permintaan dari lembaga yang berwenang seperti KPK oleh PPATK belum dapat dilakukan secara *real time* mengingat adanya keterbatasan sistem teknologi informasi yang memungkinkan akses PPATK secara langsung ke *database* bank.

Belum terdapat persepsi yang sama dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menurut kedua Analis Hukum PPATK juga merupakan kendala yang perlu dicermati karena hal ini biasanya terjadi dalam tataran praktek karena idealnya dalam melawan tindak pidana yang terorganisir diperlukan penanganan yang terorganisir pula, baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk hal tersebut undang-undang telah mengamankan PPATK sebagai institusi sentral (*focal point*) dalam membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia dengan maksud untuk mengharmonisasikan penanganan tindak pidana *pencucian* uang melalui kerjasama dan koordinasi secara efektif dan efisien.

Secara praktek, kedua Analis Hukum PPATK itu menjelaskan pelaksanaan *Know Your Customer Principles* dan penyampaian kewajiban pelaporan penyedia Jasa Keuangan bukannya tanpa menemui hambatan. Sementara ini menurut kedua analis tersebut terdapat beberapa mitos dalam penerapan *Know Your Customer Principles* dan pelaporan transaksi mencurigakan baik yang berasal dari internal Penyedia Jasa Keuangan maupun dari eksternal (masyarakat) antara lainnya:

- a. takut kehilangan nasabah. Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini merasa khawatir kehilangan nasabah apabila menerapkan sepenuhnya *Know Your Customer Principles*, baik terhadap nasabah lama (*existing customer*) maupun terhadap

nasabah baru (*new customer*). Hal tersebut dapat disinyalir dari adanya ketidakserentakan Penyedia Jasa Keuangan dalam penerapan prinsip ini terhadap nasabah. Kondisi ini menurut kedua Analis Hukum PPATK memberi peluang bagi nasabah untuk menolak memberikan informasi dan atau memindahkan dananya ke Penyedia Jasa Keuangan lainnya yang belum menerapkan *Know Your Customer Principles*;

- b. skala usaha, bagi Penyedia Jasa Keuangan yang tergolong dalam skala besar (contoh: memiliki karyawan lebih dari 21.000 orang dengan 800 kantor cabang dan 8.000.000 nasabah di seluruh Indonesia cenderung lebih sulit menerapkan prinsip tersebut sepenuhnya, seperti pendataan nasabah, pelatihan bagi karyawan dan pengadaan sistem informasi yang untuk itu dibutuhkan waktu panjang, biaya besar dan keahlian memadai;
- c. ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, untuk meningkatkan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam memenuhi kewajiban pelaporan.

Kendala lainnya menurut Analis Hukum PPATK yaitu Penyedia Jasa Keuangan masih belum optimal dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, hal ini bila dilihat dari jumlah Penyedia Jasa Keuangan yang menyampaikan laporan dibandingkan dengan jumlah Penyedia Jasa Keuangan secara keseluruhan. Hingga akhir tahun laporan, baru 34 bank umum yang telah menyampaikan laporan dari total 139 bank umum. Sedangkan 261 perusahaan asuransi, 178 perusahaan efek, 10 Reksa Dana, 18 Bank Kustodian, 393 Dana Pensiun, ratusan lembaga pembiayaan, 2130 bank perkreditan rakyat, 814 pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang belum menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK.

Selain itu, belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari pemerintah terkait dengan anggaran dan belum disahkannya peraturan di bidang kepegawaian menurut Analis Hukum Senior PPATK juga menjadi kendala bagi kelancaran kinerja PPATK. Ketersediaan anggaran dan peraturan di bidang kepegawaian menjadi syarat bagi terciptanya sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi. Langkah ini pada gilirannya akan mengefektifkan dan mengefisienkan

rezim anti pencucian uang. Di samping itu, dengan ketersediaan dana yang memadai, dapat dipakai untuk membangun sistem teknologi informasi yang handal.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. PPATK sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk memerangi kejahatan pencucian uang pada dasarnya melakukan upaya berdasarkan pedoman atau regulasi terkait pencucian uang, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi/ lembaga dalam maupun luar negeri, termasuk mengadakan pelatihan, sosialisasi, dan pertukaran informasi. Selain dari itu PPATK membuat kebijakan dan langkah-langkah guna pemberantasan pencucian uang, seperti mengeluarkan, regulasi yang menjadi pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan, termasuk mengefektifkan *compliance audit* terhadap Penyedia Jasa Keuangan, memaksimalkan tenaga-tenaga ahli, dan peningkatan kemampuan aparat instansi terkait dalam rangka pembangunan rezim anti pencucian uang, serta memaksimalkan perlengkapan teknologi informasi yang ada. Langkah--langkah yang telah dilakukan itu adalah modal awal dalam membangun rezim anti pencucian uang sehingga dapat dipandang membantu menciptakan stabilitas sistem keuangan dan sekaligus menurunkan angka kriminalitas;
- b. kendala yang dihadapi PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang meliputi keterbatasan anggaran dana guna pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kinerja PPATK, contohnya peralatan teknologi informasi termutakhir yang dapat mengimbangi modus operandi pencucian uang yang kian kompleks dan canggih seperti internet, dan *wire transfer system*, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan terkait pencucian uang, termasuk regulasi untuk pengangkatan sumber daya manusia di internal PPATK,

rendahnya kesadaran Penyedia Jasa Keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mana masih banyak bank-bank yang belum menyampaikan kewajiban pelaporan, tingkat pemahaman dan pembangunan penegak hukum dalam kejahatan pencucian uang seperti pengetahuan mengenai keterkaitan antara kejahatan semisal korupsi, *illegal logging* dan sebagainya dengan kejahatan pencucian uang, perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk di dalamnya kerjasama terutama dalam memberikan identitas yang benar dan akurat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan maka penulis menyarankan:

- a. berbagai langkah strategis untuk menyatukan langkah dan persepsi mengenai peranan masing-masing instansi terkait pencucian uang antara lain adanya nota kesepahaman (MOU) dengan instansi lain baik instansi dalam maupun luar negeri lebih ditingkatkan dan segera memberikan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah yang merupakan modal awal pembangunan rezim anti pencucian uang, melalui penguatan 4 (empat) pilar yang bertujuan membantu menciptakan stabilitas sistem keuangan dan sekaligus menurunkan angka kriminalitas hendaknya dalam tataran prakteknya dapat dijalankan secara harmonis dan terpadu mengingat sering terjadinya kesenjangan antara *law in book* dengan *law in action* di Republik Indonesia;
- b. sebaiknya keterbatasan anggaran dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan PPATK dalam rangka memerangi pencucian uang segera dicermati dan disikapi dengan segera mengingat besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan kejahatan pencucian uang terhadap stabilitas keamanan dan keuangan, terlebih lagi pencucian uang adalah kejahatan lanjutan yang dimaksudkan menghilangkan atau menyamarkan kejahatan awalnya. Hal ini perlu diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ahli dan memiliki kemampuan teruji sehingga efektifitas dan efisiensi kinerja

PPATK dalam memerangi kejahatan pencucian uang berjalan sesuai tujuan pembentukannya dan dapat mendeteksi secara dini praktek pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Garnasih, Yenti. 2004. makalah *Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya*. Media Hukum. Penerbit PT Media Indra Buana. Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta
- Purwaning, Y.B. 2004. *Cyber Laundering*. Media Hukum. Penerbit PT Media Indra Buana. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenai Nasabah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/23/PB/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.